**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAGU YANG DINYANYIKAN
ULANG (COVER) UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Oleh : Sri Wulandari

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn

Alamat : Jl. Lokomotif E2, Kota Pekanbaru, Prov. Riau

Email : swciacia1011@gmail.com. Telepon : 0813-7805-7800

ABSTRACT

Covers or re-singing of songs and/or music are currently attracting the public, especially internet users and visitors to entertainment venues such as malls, cafes, bars, and etc. Clause 9 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that the creator or Copyright holders have economic rights to his creation. Clause 3 Paragraph (5) of Law Number 28 of 2014 regarding Copyright states that Everyone who exercises economic rights in Clause 9 paragraph (1) of the Copyright Law is obliged to obtain permission from the Creator or Copyright Holder. Everyone can make commercial use in the show without permit to creator by paying rewards to author through the Collective Management Institute. So in the implementation of the cover or Re-singing, the song and/or music have to match with Law Number 28 of 2014 about Copyright.

This kind of research can be classified as normative juridical research, because this research is carried out by research secondary data and approaches to laws, This normative research study the principle of law. The data sources used are primary data, secondary data, tertiary data. Technical data collection in this research is normative juridical, the data used is literature study.

The result of the research conducted by the author was case of re-singing or covering songs and/or music that has commercial value without permission from the Creator or Copyright Holder is an act that is contra to law, as for the legal consequences of re-singing or covering songs and/or music without this permission is a violation of the economic rights of Creator or Copyright Owner, and disputes can be carried out in the Commercial Court.

Keywords: Song, Covers, Copyright, Commercial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk mempertunjukan atau memutar lagu di depan umum merupakan salah satu hak eksklusif Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Jika ingin memainkan musik/lagu di depan umum harus mendapatkan izin atau lisensi, kecuali musik/lagu tersebut sudah masuk ke dalam domain publik atau penggunaannya memenuhi syarat pemakaian yang wajar (*Fair Use*). Di dalam Undang-undang Hak Cipta, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.¹ Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.²

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait yang meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak.³ Hak ekonomi diperhitungkan karena hak

kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.⁴ Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.⁵

Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar yaitu untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak peterniti (*the right of peternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*). Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu, meliputi larangan mengadakan perubahan dalam ciptaannya, larangan mengubah judul, larangan mengubah penentuan pencipta, dan hak mengadakan perubahan.⁶

Berdasarkan fakta lapangan, dampak negatif yang timbul dari penyalinan ulang lagu dan musik di kafe ataupun tempat umum lainnya untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta dan/atau tanpa membayarkan royalti kepada pencipta sangat berpengaruh karena akan semakin banyak penyalin

¹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

² Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dan Hubungannya dengan Prinsip-prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, Rabanni Press, Jakarta, 2011, hlm. 36.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19.

⁵ Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 74.

lainnya yang menyanjikan ulang lagu dan musik tanpa izin pencipta, mereka juga tidak peduli dan paham terkait pembayaran royalti yang harusnya di bayar kepada pencipta akibat dari kepentingan komersial yang mereka lakukan. Pencipta dirugikan karena tidak mendapat haknya dari tindakan yang dilakukan oleh penyanyi yang menyanjikan lagu dan musik mereka alias secara cuma-cuma.

Seperti kasus yang terjadi pada bulan September 2018, bermula saat Atta Halilintar membagikan video cover lagu yang berdurasi 4 menit 2 detik dipopulerkan oleh Siti Badriah ke akun YouTube @Gen Halilintar yang berjudul Lagi Syantik. Lagu tersebut dinyanyikan ulang oleh Gen Halilintar dengan sejumlah pengubahan lirik serta tanpa mengantongi izin dari pencipta lagu yaitu Yogi RPH dan Donall maupun pihak Nagaswara selaku pemegang hak cipta lagu. Pihak Nagaswara merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak Gen Halilintar. Kerugian tersebut merupakan kerugian secara materil dan imateril, karena kerugian moril dan pelanggaran hak cipta yang dilindungi hukum.⁷ Pihak Nagaswara menggugat secara perdata keluarga Gen Halilintar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gen Halilintar digugat sebanyak Rp 9,5 Milyar oleh pihak Nagaswara dengan tergugat ayah dan ibu dari Atta Halilintar yaitu Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk.⁸ Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang ataupun berkelompok ingin melakukan penyanyian ulang lagu atau musik (cover) untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan izin dari pencipta lagu dan

musik terkait agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia tentang hak cipta. Serta kewenangan absolut pengadilan sengketa terkait dengan Hak Cipta yaitu Pengadilan Niaga dan dapat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁹ Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Lagu yang dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover) tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaturan terhadap lagu yang dinyanyikan ulang untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pencipta atas karya

⁷<https://m.tribunnews.com/amp/seleb/2020/02/03/kronologi-gen-halilintar-diduga-melanggar-hak-cipta-lagu-siti-badriah-bertemu-nagaswara-tapi?page=all>, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 20.03 WIB.

⁸<https://m.liputan6.com/hot/read/4183139/nagaswara-gugat-keluarga-gen-halilintar-rp-95-miliar-ini-7-fakta-terbaru>, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.

⁹ Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover) tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

2) Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis agar dapat berguna sebagai berikut :
 - i. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi guna menyelesaikan syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - ii. Bagi dunia akademik, guna memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum.
 - iii. Bagi instansi yang terkait sebagai Hukum Perdata Bisnis yang berkaitan dengan hak cipta.
- b. Secara Praktis agar dapat berguna sebagai berikut :
 1. Bagi penyanyi guna sebagai sumber masukan dalam menyanyikan ulang lagu dan musik untuk kepentingan komersial.
 2. Bagi pencipta lagu dan musik untuk menambah pengetahuan agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemilik hak cipta.
 3. Penelitian ini kiranya dapat memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait dengan lagu yang dinyanyikan ulang untuk kepentingan komersial.

¹⁰ <https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 20.38 WIB.

¹¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 14.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Di dalam konsep *Civil Law System*, Hak Cipta merupakan *Natural Right Justification* yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta adalah *reward* (penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argumen moral, merupakan *author's right system*, yaitu penekanan perlindungan *personality* pencipta melalui ciptaannya lebih daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri.¹¹

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”¹²

Karya seni lagu atau musik merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil karya seni tersebut haruslah dapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-Undang Hak Cipta.¹³ Hak cipta tidak hanya harus dilindungi akan tetapi harus mementingkan terkait nilai komersial yang terkandung di dalamnya. Penyanyian ulang (cover) lagu atau musik untuk kepentingan komersial juga harus

¹² Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta.

¹³ Andrien Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

mendapatkan izin dari pemilik hak cipta agar mendapatkan nilai komersial bersama.

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kekeliruan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis merasa perlu memberikan definisi.

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁸
2. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.¹⁹
3. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah, kepada, lawan.²⁰

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

¹⁵ Ibid, hlm. 69.

¹⁶ Rita Teresia, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

¹⁷ Iswi Hariyani, *Op Cit*, hlm. 46.

¹⁸ www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 30 Juni 2020, Pukul 13.21 WIB.

¹⁹ www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 30 Juni 2020, Pukul 13.23 WIB.

²⁰ www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 30 Juni 2020, Pukul 13.24 WIB

4. Lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernanyi, membaca, dan sebagainya)²¹
5. Dinyanyikan Ulang (*Cover*) adalah menyanyikan lagu milik orang lain dengan melakukan aransemen musik maupun dinyanyikan dengan ciri khas si penyanyi.²²
6. Kepentingan adalah keperluan, kebutuhan.²³
7. Komersial adalah berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya), mencari keuntungan sendiri.²⁴
8. Undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.²⁵
9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁸ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*.²⁹ Penelitian hukum normatif adalah menemukan koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah aturan hukum sesuai dengan prinsip hukum serta perbuatan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.³⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulisan membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan. Terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 30 Juni 2020, Pukul 13.26 WIB.

²² https://www.google.co.id/amp/s/www.idntimes.com/hype/entertainment/amp/irvin-nofriantopabane/lagu-covwr-bagus-hp-clc2, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, Pukul 14.20 WIB

²³ www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, Pukul 14.30 WIB.

²⁴ www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, Pukul 14.40 WIB.

²⁵ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Reformasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 302.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta.

²⁷ Mochtar Kusumaadmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Binacipta, Bandung, 1990, hlm. 273.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2003, hlm 47.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*.

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian penulis yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku maupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat, meliputi:

- a) Perpustakaan Wilayah Riau
- b) Perpustakaan Universitas Riau
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan klasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikan dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif yaitu cara

menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Karakteristik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian tertulis atau;

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu yang menganut Civil Law System maupun Common Law System.

3. Subjek Hukum Hak Cipta

Subjek hukum Hak Cipta ialah pencipta dan pemegang hak cipta, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang digolongkan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat dirinci antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Pencipta
- b. Pemerintah
- c. Pegawai Swasta
- d. Pekerja lepas (*freelancers*)
- e. Negara
- f. Pemegang Hak Cipta Potret
- g. Beberapa Pencipta

4. Hak-hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta telah di atur dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Undang-undang ini mengatur : a. Hak Cipta; dan b. Hak Terkait” dalam Undang-undang ini pula telah dijelaskan pengertian Hak Cipta pada Pasal 4 yang berbunyi:

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”

dan penjelasan mengenai Hak Terkait pada Pasal 20 yang berbunyi :

“Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- a. Hak moral pelaku pertunjukan
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.”

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Di Indonesia lama perlindungan Hak Cipta tidak sama untuk setiap bidang Ciptaan, dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur pada Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 61 ayat (1) dan (2).

6. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

1. Sistem Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Sistem pendaftaran Hak Cipta didasarkan atas permohonan pemohon, bersifat semi konstitutif, maksudnya pendaftar yang mendaftarkan haknya merupakan pemegang pendaftaran hak pertama yang diakui Undang-undang sebagai first ti file (terdaftar), tetapi pendaftaran bukan mengesahkan atas isi dari hak atau penguasaan atas barang ciptaan.³²Hak Cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta

³¹ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang, 2006, Hlm. 11.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm. 22.

dilindungi, hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu yang lama dalam hal pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang telah didaftarkan.

2. Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

Prosedur pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut :

1. Setelah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan administratif mengenai kelengkapan dokumen.
2. Jika dalam pemeriksaan administratif dokumen belum lengkap, pemohon diberi waktu 3 bulan untuk melengkapinya.
3. Ditjen KI kemudian akan melakukan evaluasi dan jika tidak ada keberatan terhadap permohonan pencatatan hak cipta, Ditjen KI akan mengeluarkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan.

3. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta

Dalam pelaksanaan pendaftaran ciptaan, pihak Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan menerima setiap permohonan dengan tidak melakukan penelitian secara terperinci tentang suatu ciptaan yang didaftarkan karena asas pendaftaran menganut sistem negative deklaratif, artinya orang yang dianggap sebagai seorang pencipta adalah orang yang pertama kali mengumumkan suatu ciptaannya, dimana pengumuman pertama kali dianggap sama dengan pendaftaran

ciptaan, jadi apabila terjadi sengketa atas ciptaan itu maka diserahkan kepada hakim untuk mengambil keputusan,³³ kecuali jelas-jelas ciptaan yang didaftarkan tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta maka Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berhak menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini maka pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.³⁴

7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Secara formal, tidak ada ketentuan khusus bahwa kasus hak atas kekayaan intelektual (HaKI) harus diperiksa atau ditangani oleh hakim yang ahli dalam bidang HaKI. Dalam prakteknya, di Mahkamah Agung telah dibentuk tim khusus untuk memeriksa dan menangani kasus-kasus HaKI maupun kasus-kasus perdata lainnya, khususnya kasus-kasus kepailitan. Untuk kasus HaKI, pernah dibentuk suatu Dewan Hakim Khusus untuk memeriksa dan menangani kasus-kasus HaKI, akan tetapi Dewan Hakim Khusus tersebut merupakan cikal bakal “sistem kamar” dalam penanganan perkara, tidak dapat bekerja konsisten dalam menyelesaikan kasus. Hal ini dikarenakan pendeknya masa kerja seorang hakim tersebut, dan penggantinya tidak langsung dapat ditunjuk, karena hakim-hakim lainnya masih terikat pada pekerjaan sebelumnya, selain itu masih terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai penerapan “sistem kamar”, dimana yang satu mengarah pada spesialisasi dan lain tetap pada sistem

³³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op Cit*, hlm. 185.

³⁴ Rooseno Harjowidigo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 40.

bahwa hakim harus dapat menangani semua perkara. Dalam HIR (Hertz Inlands Reglement), tidak ada pembatasan jangka waktu mengenai penyelesaian suatu kasus, tetapi dengan berlakunya Undang-undang HaKI yang baru, khususnya Hak Cipta maka permohonan kasasi harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Lagu yang dinyanyikan Ulang Untuk Kepentingan Komersial

1. Pengertian Lagu yang dinyanyikan Ulang (Cover)

Di dalam industri musik, **versi daur ulang, versi cover** (Inggris: *cover version*), **remake, lagu cover, revival**, atau cukup disebut **cover** merupakan sebuah rekaman atau penampilan baru dari lagu yang sebelumnya pernah dirilis secara komersial. Rekaman baru yang dimaksud dilakukan oleh musisi yang berbeda dengan versi awalnya. Untuk meng-*cover* sebuah lagu dengan tujuan komersial, biasanya harus memiliki lisensi mekanik dan hak mengumumkan dari penulis lagu atau melalui penerbit musik yang mengelola lagu tersebut.³⁶

2. Pengertian Kepentingan Komersial

Komersial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nilai komersial adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari produk si pencipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Komersial

artinya adalah berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya);. Dan mengomersialkan yaitu menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan, menggunakan sesuatu untuk berdagang (mencari keuntungan sendiri).³⁷

3. Para Pihak Dalam Penyanyian Ulang (Cover)

Para Pihak dalam Penyanyian Ulang (Cover) lagu dan/atau musik dikenal 3 pelaku, yaitu Pencipta yang menciptakan karya musik dan/atau lagu. Selanjutnya pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Kemudian pengguna (user) yang menyanyikan ulang (*cover*) lagu dan/atau musik. Selain pencipta, pemegang hak cipta dan pengguna (user), dalam penyanyian ulang (*cover*) lagu dan/atau musik juga melibatkan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai penghimpun royalti yang timbul dari prnyanyian ulang (*cover*) lagu dan/atau musik yang bernilai komersial.

4. Mekanisme Pembayaran Royalti Dalam Penyanyian Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial

Adapun mekanisme pembayaran royalti menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu :

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari

³⁵ Rooseno Harjowidigo, *Op Cit*, hlm. 91.

³⁶ [https://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang_\(musik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang_(musik)), diakses pada tanggal 28 Juni 2021, Pukul 10.50 WIB.

³⁷ www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 28 Juni 2021, Pukul 11.08 WIB.

pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

2. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.

3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak dalam karya cipta lagu di dalamnya terdapat berbagai macam hak. Hak-hak di dalam hak cipta itu (isinya) dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu :

1. Hak Ekonomi (*Economic Right*) Hak ekonomi adalah hak yang mempunyai nilai uang, biasanya dapat dialihkan dan dieksploitasikan secara

ekonomis.³⁸ Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri oleh Pencipta atau orang lain yang diberinya izin atau lisensi. Hal ini merupakan sesuatu yang sah dan mendapat perlindungan hak cipta.³⁹

2. Hak Moral (*Moral Right*) Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun.⁴⁰ Perbedaan dalam kedua hak di dalam hak cipta tersebut adalah , bahwa dalam hak ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi sedangkan hak moral adalah yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Terkait dengan Konsep Hak Cipta, Hak Cipta sangat berkaitan dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat disimpulkan bahwa menyanyikan ulang lagu dan/atau musik (cover) untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Musisi selaku pencipta lagu dan musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan music tersebut. Kemudian pengguna (user) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh

³⁸ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm.15.

³⁹ Otto Hasibuan, *Op.cit.*, hlm. 151.

⁴⁰ Otto Hasibuan, *Op.cit.*, hlm. 69.

pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.⁴¹

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴² Mengenai ketentuan royalti dalam UU Hak Cipta tidak disebutkan hanya dijelaskan tentang pengertiannya saja serta dengan perjanjian lisensi maka si penerima lisensi tersebut harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Mengenai ketentuan royalti hanya dilakukan antara pengguna(User) dan pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.⁴³ Saat ini Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada tanggal 30 Maret 2021, maka dari itu aturan mengenai pembayaran royalti sangat jelas saat ini karena sudah tercantum dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

B. Perlindungan hukum terhadap Pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover) tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa ijinnya.⁴⁴ Menurut Satjipto Rhardjo, Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁵

Karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover) tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial ini mendapatkan perlindungan hak cipta dengan tujuan melindungi hasil karya Pencipta secara preventif dan represif yaitu pencipta mengajukan gugatan perdata berupa ganti kerugian kepada pelaku menyanjian ulang (cover) lagu dan/atau musik tanpa izin tersebut. Gugatan perdata berupa ganti rugi ini terdapat pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, lalu diajukan oleh Pencipta ke Pengadilan Niaga yang terdapat pada Pasal 100 ayat (1), pada Pasal 99 ayat (2) ganti rugi dapat berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada Pencipta. Selain itu terdapat pula tuntutan ganti rugi pada Pasal 99 ayat (3) yang diajukan oleh Pemegang Hak Cipta.

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diartikan sebagai suatu perlindungan terhadap subyek hukum

⁴¹ Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber". *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2016, hlm. 13-14.

⁴² Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen", *Jurnal Ilmiah*, Ilmu

Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm. 704.

⁴³ Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati, *Op Cit*, hlm. 1914.

⁴⁴ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 23.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

dalam hal ini “pencipta”. Hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan. Adanya kejelasan hukum akan memberikan kemudahan pada penegakan hukum.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014, menurut sifatnya hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik melalui proses pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan. Hak cipta selain dapat beralih dan dialihkan juga dapat dilisensikan.⁴⁷ Kata lisensi berasal dari kata *Licentia* yang berarti kebebasan atau ijin. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu (Pasal 1 angka 14 UU No. 28 Tahun 2014). Objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta. Hak yang dimaksud adalah hak cipta di bidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak di bidang rekaman. Kemudian apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.⁴⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyanyian Ulang (*Cover*) lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial melalui media internet

maupun secara langsung seperti *live music* di kaffe, mall, atau di tempat umum lainnya merupakan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku jika tidak meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak membayarkan royalti atas nilai komersial yang didapatkan kepada LMKN lagu dan/atau musik tersebut..

2. Perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk *cover version* yang dikomersilkan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan seperti diatur dalam Pasal 66-67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Upaya represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan (Pasal 95 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014). Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Niaga.

B. Saran

1. Perlu adanya teguran dan sanksi yang berikan oleh Pemegang atau Pemilik Hak Cipta dan LKMN (Lembaga Kolektif Manajemen Nasional) kepada para Pengguna (user) yang menyanyikan ulang (*cover*) yang mengambil kepentingan komersial ini serta adanya pemeriksaan secara berkala terhadap kafe, mall ataupun tempat umum lainnya yang melakukan pemutaran dan penyanyian ulang (*cover*) lagu

⁴⁶Anak Agung Mirah Satria Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube”, *Jurnal Ilmiah*, Magister Hukum Kertha Samaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm. 517.

⁴⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 40-41.

⁴⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 47.

dan/atau musik terkait pembayaran royalti. Melihat bagaimana hukum seharusnya dijalankan terutama kepada pengguna (user) yang melakukan pemutaran lagu dan/atau musik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Tentang Hak Cipta, dalam memberi upaya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan yaitu Pemegang atau Pemilik Hak Cipta.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Maka perlu adanya pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemberian informasi terkait perlindungan hukum bisa melalui sosialisasi baik secara langsung maupun secara *daring*. Pemerintah yang berwenang dapat menciptakan aplikasi digital untuk penyebaran informasi terkait dengan perlindungan hukum dan pembayaran royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dharmawan, N.K.S., dkk. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (1993). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, O. (2014). *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society*. Bandung: Alumni Bandung.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaadmaja, M., & Agoes, E. R. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Margono. S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Marzuki, M. P. (2003). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Edisi Revisi, Kencana.
- Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Paserangi, H., & Ahmad, I. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dan Hubungannya dengan Prinsip-prinsip dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabanni Press.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Pres.
- Saidin, OK. H. (2003). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Supramono, G. (2010). *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, A. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Stim, R. (2010). *Patent, Copyright & Trademark*. Berkeley California: NOLO.

Wahyudi, A. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Reformasi*. Bandung: Binacipta.

B. Kamus / Skripsi

Dewi, A, A, M, S. (2017). “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube”, Magister Hukum Kertha Samaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Febriharini, M, P. (2016). “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber”. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Garner, A, B. (2014), *Black's Law Dictionary Tenth Edition*, Thampson West, Minnesota. Diterjemahkan oleh Google Translate.

Teresia, R. (2015). “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet”, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Zefanya, D.G.J., & Indrawati, A.A.S. (2020). “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia”, Ilmu Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Yogiswari, N.M.D., & Mudana, I.N. (2020) “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen”, Ilmu Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Website

www.kkbi.co.id/

<https://www.google.co.id/amp/s/www.idntimes.com/hype/entertainment/amp/irvin-nofrianto-pabane/lagu-covwr-bagus-hp-clc2>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, Pukul 14.20 WIB

<https://m.liputan6.com/hot/read/4183139/nagaswara-gugat-keluarga-gen-halilintar-rp-95-miliar-ini-7-fakta-terbaru>, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB.

<https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 20.38 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang_\(musik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang_(musik)), diakses pada tanggal 28 Juni 2021, Pukul 10.50 WIB.